

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM KEUANGAN DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ika Nur Lestari**

**NPM : 4320600018**

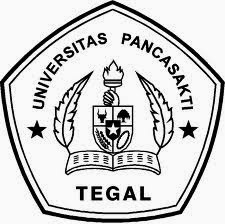
Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM KEUANGAN DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

**Ika Nur Lestari**

**NPM : 4320600018**

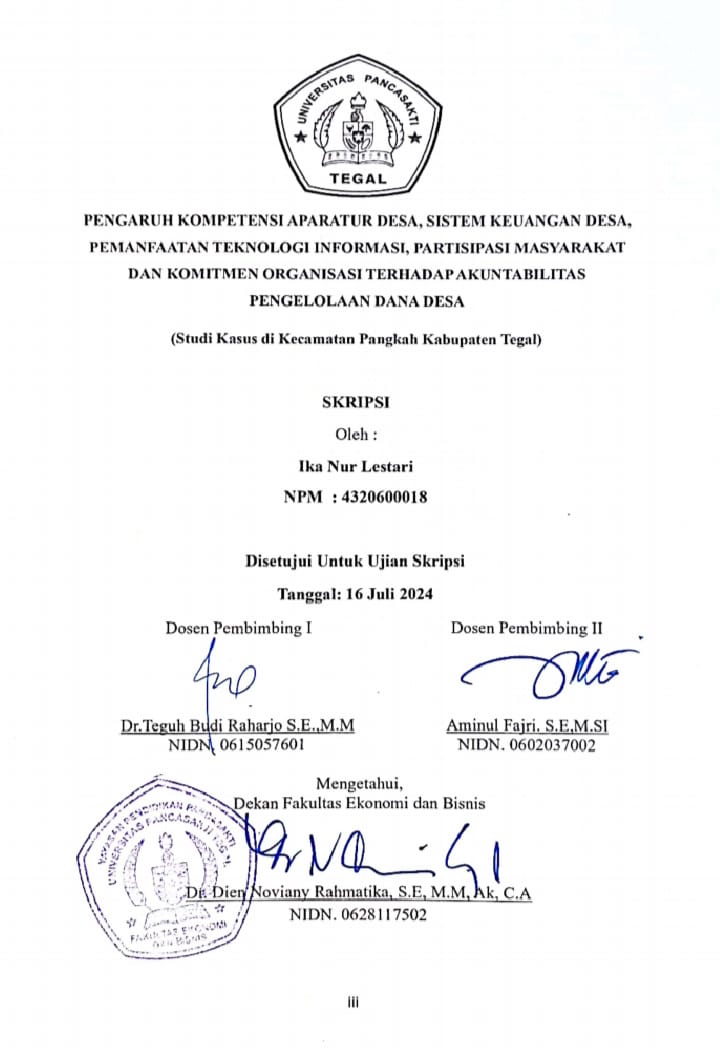
Diajukan Kepada :

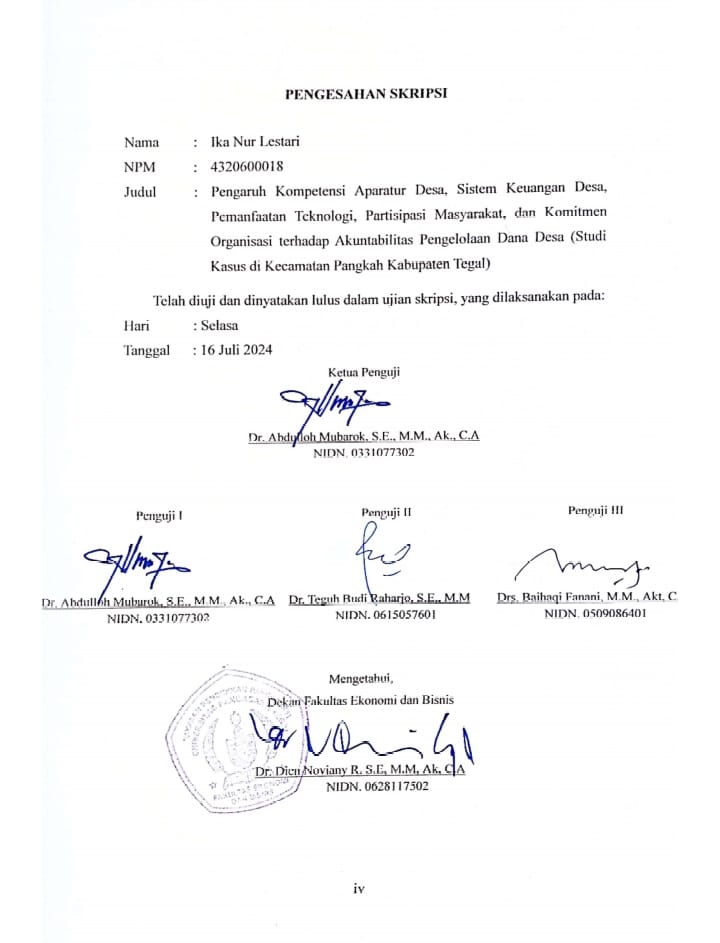
**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



****

|  |
| --- |
|  |
| **MOTTO**  *“Pada akhirmya ini semua hanyalah permulaan”*  (Nadin Amizah)  Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  (QS. Al-Insyirah 5-6)  *“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancer. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”*  (Boy Candra)  **PERSEMBAHAN**  Kupersembahkan Skripsi ini kepada:   1. Bapa waridi dan mama eli tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi, pengorbanan dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan dan keberhasilan saya. 2. Mbah kung dan mbah putri terimakasih atas doa dan pengorbanan selama ini. 3. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. 4. Adikku terimakasih telah memberikan dukungan, pengorbanan, perhatian. 5. Teman-teman saya veren, ninda, bela, titi, karput yang membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. 6. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu selama ini dan selama penulisan skripsi ini.     **ABSTRAK**  Ika Nur Lestari, 4320600018, Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di kecamatan pangkah kabupaten tegal. Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2024.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di kecamatan pangkah kabupaten tegal).  Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan alat analisis data yang diujikan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji kelayakan model, uji parsial, dan uji koefisien determinan dengan menggunkan program SPSS versi 22. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pengelola dana desa yang terdiri Kepala desa, Sekertaris, Bendahara dan ketua BPD, dengan jumlah responden 92 perangkat desa.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan pangkah. Sedangkan kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi Masyarakat, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus di kecamatan pangkah kabupaten tegal).  **Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**  **ABSTRACT**  Ika Nur Lestari, 4320600018, Influence of Village Apparatus Competence, Village Financial System, Use of Information Technology, Community Participation and Organizational Commitment to Accountability in Village Fund Management (Case study in Pangkah sub-district, Tegal district. Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Pancasakti University, Tegal 2024.  This research aims to determine the influence of village apparatus competency, village financial system, use of information technology, community participation and organizational commitment on accountability in village fund management (case study in Pangkah sub-district, Tegal district).  This research uses a quantitative analysis method with the data analysis tools tested are descriptive analysis, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis, model feasibility test, partial test, and determinant coefficient test using the SPSS version 22 program. Retrieval techniques The sample used was a saturated sample. The population in this study was the village fund manager consisting of the village head, secretary, treasurer and chairman of the BPD, with a total of 92 village officials as respondents.  The results of the research show that the village financial system has a positive effect on the accountability of village fund management in Pangkah sub-district. Meanwhile, the competence of village officials, use of information technology, community participation, organizational commitment have no effect on accountability in managing village funds (case study in Pangkah sub-district, Tegal district).  **Keywords: Village Apparatus Competence, Village Financial System, Utilization of Information Technology, Community Participation and Organizational Commitment to Accountability in Village Fund Management** |

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia - nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **” Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”.**

Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk Menyusun skripsi pada program studi (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penelitian menyadari dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak, maka untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, CA., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdulloh Mubarok, SE., M.M, Ak, C.A, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Teguh Budi Raharjo. S.E, MM selaku pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Aminul Fajri. S.E, M.SI selaku pembimbing II yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.

Kami menyadari proposal penelitian untuk skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami menghadapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berhadap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Juni 2024

Ika Nur Lestari

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSIiv**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN v**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN**

**PUBLIKASI vi**

**ABSTRAK vii**

**KATA PENGANTAR x**

**DAFTAR ISI xii**

**DAFTAR TABEL xiv**

**DAFTAR GAMBARxv**

**DAFTAR LAMPIRANxvi**

**BAB I PENDAHULUAN1**

1. Latar Belakang Masalah1
2. Rumusan Masalah9
3. Tujuan Peneitian 9
4. Manfaat Penelitian10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA11**

1. Landasan Teori11
2. Teori Stewardship11
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 12
4. Kompetensi Aparatur Desa15
5. Sistem Keuangan Desa 19
6. Pemanfaatan Teknologi22
7. Partisipasi Masyarakat26
8. Komitmen Organisasi30
9. Dana Desa33
10. Penelitian Terdahulu42
11. Kerangka Pemikiran Konseptual45
12. Hipotesis 48

**BAB III METODE PENELITIAN50**

1. Jenis Penelitian50
2. Populasi dan Sampel50
3. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel53
4. Metode Pengumpulan Data55
5. Metode Analisis Data57

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN63**

1. Gambaran Umum63
2. Hasil Penelitian65
3. Pembahasan82

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN89**

1. Kesimpulan89
2. Saran90

**DAFTAR PUSTAKA92**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Tabel** | **Halaman** |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu42

Tabel 3.1 Sampel Data51

Tabel 3.2 Operasional Variabel54

Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian……………………………...………………...65

Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 66

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Usia 66

Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan 67

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas 68

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 70

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif 71

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas 74

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikollinearitas 76

Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 77

Tabel 4.11 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f) 79

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t) 80

Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 82

**DAFTAR GAMBAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gambar** | **Halaman** |

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran Konseptual 48

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas……………………………………… 75

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner 99

Lampiran 2 Surat ijin penelitian 109

Lampiran 3 Bukti pengambilan data 111

Lampiran 4 dokumentasi pengisian kuesioner 115

Lampiran 5 Tabulasi jawaban responden 116

Lampiran 6 Hasil uji validitas 130

Lampiran 7 hasil uji reabilitas 141

Lampiran 8 statistik deskriptif 141

Lampiran 9 uji asumsi klasik 143

Lampiran 10 uji hipotesis 143

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yudiris dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini memungkinkan desa untuk mengendalikan keuangannya dan memaksimalkan kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa. Akuntabilitas dan keuangan desa mempunyai keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum, akuntabilitas dicirikan sebagai kewajiban untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian atau tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara berkala dan historis oleh suatu organisasi. Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam keseluruhan strategi pengelolaan keuangan pemerintah desa yang bertanggung jawab (Prasetyo & Muis, 2015).

Implementasi UU Desa ditetapkan di mulai pada tahun 2015. UU No. 6 Tahun 2014 yang memuat peraturan pemerintahan desa yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan desa (Presiden Republik Indonesia, 2014). Anggaran desa yang cukup besar akan disalurkan ke setiap desa di indonesia sebagai bagian dari kebijakan ini. Anggaran ini ditetapkan oleh pemerintah dan dikumpulkan setiap tahun sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) yang menetapkan tujuan membangun indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa merupakan contoh lain bagaimana pemerintah menetapkan peraturan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT). Peraturan tersebut menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang melimpahkan kewenangan kepada kepala desa secara otonom bertujuan untuk meletakkan landasan pembangunan di tingkat desa.

Desa berhak mengendalikan dan mengawasi kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Terbentuknya pemerintahan desa yang professional, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu tujuan peraturan desa, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Kewenangan desa meliputi kemampuan mengatur urusan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan melaksanakan pembangunan desa. Memajukan persatuan desa, dan memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengambil tindakan atas nama mereka sendiri dan sesuai dengan hak dan adat istiadat mereka. Konsep akuntabilitas harus digunakan agar suatu desa dapat mencapai tujuan pengelolaan keuangannya. Perencanaan pengelolaan keuangan akan berhasil bila dilakukan dengan tanggung jawab yang sesuai. Tata kelola desa yang efektif akan mendorong peningkatan tata kelola daan pelayanaan masyarakat, yang pada gilirannya memungkinkan dana desa berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Irma, 2018).

Menurut UPDESA, (2023). Jumlah uang yang diberikan pemerintah pusat kepada desa sangatlah besar dan tanggung jawab yang besar. Total anggaran desa pada tahun 2015 sebesar Rp 20,766 triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp 46,982 triliun, pada tahun 2017 sebesar 60 triliun pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun, 2020 sebesar Rp 71,2 triliun. 2021 sebesar Rp 72 triliun, pada 2022 Rp 68 triliun, dan 2023 Rp 70 triliun. untuk sejumlah desa yang tersebar di seluruh indoensia. Selain keuaangan desa, sumber pendapatan desa lainnya adalah alokasi dana desa dan uang bantuan dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten.

Penggunaan alokasi dana desa tidak menutup kemungkinan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang seharusnya di percaya oleh masyarakat menggunakan dana desa secara bertanggung jawab untuk melakukan penipuan ketika desa di bangun. Ketika desa sedang di bangun. Semakin canggih dan canggihnya, masyarakat mempunyai peran penting dalam mengawasi langsung penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjamin kelancaran pembangunan desa. Untuk mengurangi kecurangan, pemerintah desa dituntut untuk diawasi secara ketat oleh masyarakat. Hal ini dilakukan karena 30% dana desa dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 70% diperuntukan bagi kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membantu masyarakat desa yang berkomitmen dalam mengembangkan atau meningkatkan prasarana dan sarana fisik desa, seperti kecil ruang public, pembenahan kawasan sekitar dan pemukiman, memberikan upeti/honor tim kepada Alokasi Dana Desa (ADD) tim pelaksana, penguatan kelembagaan desa, dan inisiatif lain yang dianggap penting bagi kemajuan desa. Di sisi lain, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menyelenggaraan pembentukan pemerintah desa adalah untuk memperlancar kerja badan permusyawaratan desa dan operasional pemerintah desa (Petrus Peleng Roreng & Adiel Kemal Pratama, 2019).

Pemerintah desa harus menerapkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya dan memastikan masyarakat mendapat informasi mengenai kegiatan yang dilakukannya. Desa yang memenugi standar tata Kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel diperlukan mengingat besarnya dana desa dan ekspetaktasi pertumbuhannya setiap tahunnya. di perlukan keuangan desa yang akuntabel. Sangat penting bagi entitas pemerintah maupun bisnis untuk memiliki akuntabilitas agar mereka dapat bertanggung jawab kepada *shareholder* mereka. Pemerintah adalah organisasi yang bertanggung jawabmelayani masyarakat dari sektor swasta. Oleh karena itu akuntabilitas selalu muncul ketika secara otomatis apabila entitas menerbitkan ataupun sedang menerbitkan efek di pasar modal dan memiliki aset yang mewakili sekelompok besar masyarakat (BPKP, 2015).

Penerapan segala tindakan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa tunduk pada prinsip akuntabilitas, sehingga fungsinya sebagai agen menjadi komponen penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keahlian mereka dan pencapaian akuntabilias pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. (Widyatama, 2017). Menurut Efendi (2015) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sukses, efisien, dan professional, seseorang harus mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pendidikan. Hal ini dikenal dengan istilah kompetensi.

Pengelolaan dana desa mempunyai kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa untuk memahami teknik pengelolaan dana desa yang benar. Jika mereka tidak menyadari hal ini, laporan mereka tidak akan sesuai dengan kriteria pemerintah, yang akan mengakibatkan informasi yang tidak akurat sampai ke masyarakat dan mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan di kemudian hari (Pahlawan et al., 2020).

Penyampaian laporan keuangan khususnya melalui program Sistem keuangan desa (Siskeudes) kepada pemerintah desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sebuah aplikasi yang memuat gagasan akuntabilitas untuk menjaga pertanggung jawaban keuangan daerah. Sebagai salah satu komponen entitas pelaporan keuangan, pemerintah desa diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang di tentukan.

Rendahnya pemahaman terhadap penyajian laporan keuangan desa yang memuat informasi lengkap dan relevan serta tersedia secara langsung menjadi salah satu tantangan dan permasalahan dalam penyajian laporan keauangan desa lainnya. Ketersediaan segera langsung. Serta ketersediaan sistem informasi yang komprehensif dan relevan. Pengelolaan anggaran desa yang efektif bergantung pada tersedianya sistem informasi yang memadai (Aziiz, N. M., dan Prastiti, 2019).

Pengelolaan dana desa berbasis teknologi informasi juga diperlukan karena dapat memudahkan organisasi dalam menyelesaikan proyek dan kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi diperukan untuk pelaporan keuangan yang akurat. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola data, mengolah informasi, mengolah sistem dan membuat prosedur kerja elektronik. Hal ini membuat pelayanan public menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga tentunya lebih efektif. Hal ini juga berdampak langsung pada pemerintah yang harus selalu siap memnuhi tuntutan. Karena pertumbuhan masyarakat, lembaga pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi informai yang berkembang pesat, selain perusahaan komersial. Untuk memperlancar operasional dan pekerjaan pemerintahan secara terpadu, pemerintahan daerah harus mengembangkan dan menerapkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan jaringan sistem informasi manajemen antara perangkat desa dan proses kerja. Ini akan memudahkan dalam menjalankan semuanya (Deviyanti & Wati, 2021).

Pengelolaan keuangan dana desa agar masyarakat memahami sejauh mana penaggung jawab aparat desa dalam penyaluran dana desa, pengelolaan keuangan dana desa memerlukan partisipasi masyarakat di lapangan dan pengawasan penggunaan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat sangat bermanfaat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Selain itu, pelibatan Masyarakat di perlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan uang desa. Semakin banyak masyarakat dilibatkan, maka Pembangunan akan semakin baik dan semakin besar pula rasa akuntabilitas mereka dalam melaksanakan Keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah rencana. Hasil dari pengelolaan keuangan desa yang bijaksana adalah pembanagunan yang positif (Deviyanti & Wati, 2021).

Menurut Septarini & Papilaya (2016). Keadaan seseorang individu dalam memihak suatu organisasi dan tujuan-tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan suatu keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi akan menimbulkan *sense of belonging* pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dalam bermotifasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Richter et al (2017). Komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan menerima terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi.

Ditambahkan oleh Uddin & Hopper (2003) bahwa para pemimpin organisasi mempunyai kendali tertentu untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan melalui metode perencanaan (pelanggaran desa) bermanfaat bagi masyarakat desa. Para peneliti menemukan masih kurangnya sistem peneliti menemukan masih kurangnya sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, akuntabilitas, transparansi dan kompetensi di lapangan, khususnya pada pemerintah desa. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana desa karena aparat pemerintah desa kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan.

Berdasarkan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana desa muncul karena ketidaktahuan aparat desa terhadap pelaporan dan tata kelola keungan, sehingga rentan terhadap penipuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 676 aparat desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi anatara tahun 2015 dan 2020. Negara mengalami kerugian hingga Rp 111 miliar akibat aparat desa melakukan tindakan korupsi (Tatang Guritno, 2021).

Akuntabilitas di kabupaten tegal masih belum tercapai, dikarenakan kurangnya pemahaman akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terjadinya tindak penyelewengan atau korupsi dana desa (Abidin, 2015). Terjadi tindak kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan tiga perangkat desa di kecamatan pangkah, kabupaten tegal ketiga terdakwa itu ialah kepala desa pangkah hingga ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Apapun dugaan penyelewengan dana desa pangkah itu pada kegiatan Pembangunan fisik di APBDes tahun 2019 berdasarkan hasil audit negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 230 juta. Mereka di nilai telah menyalahgunakan jabatan, dan pengelolaannya, serta kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola. (Pantura post, 2022)

Beberapa penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti & Wati (2022) tentang Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Mufti Arief Arfiansyah (2020) menunjukkan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan menurut Siti Nurhayati & Mei Diana (2020) partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisispasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. **Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh sistem keuangan desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
4. Untuk dapat mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
5. Untuk dapat mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
6. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi penyumbang ilmu pengetahuan untuk bahan pembelajaran tambahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang Akuntabilitas Pemerintah desa, dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Teori Stewardship**

Menurut Ikhsan & Suprasto (2008) teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih fokus pada hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini akan mengintegrasikan Kembali penggunaan kekuasaan, pemberdayaan, kemitraan, dan pengurusan pekerjaan yang benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya serta mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang memungkinkan eksekutif Perusahaan atau organisasi sebagai pelayan untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai dengan keinginan pemerintah pusat dan masyarakat. Instansi pemerintah yang fokus pada pelayanan masyarakat dari pada laba lebih cocok untuk menggunakan teori stewardship.

Implikasi penelitian ini, teori stewardship dapat membantu menjelaskan keadaan pemerintah desa *(steward)* sebagai organisasi yang dapat di percaya dan bertindak demi kepentingan public dengan melakukan tugas dan fungsi dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa harus melaksanakan tugas membuat pertanggungjawaban keuangan dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Aparatur desa harus memiliki kompetensi yang mampu untuk menjamin akuntabilitas ini. Pemerintah desa menciptakan akuntabilitas untuk meningkatkan tanggung jawab masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan untuk meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan dimasa depan.

1. **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**
   1. **Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sarana yang telah di tetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yesinia et al., 2018). Akuntabilitas didefinisikan dalam stuktur pemerintahan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan tindakan masyarakat, pimpinan lembaga, badan hukum yang memiliki hak dan berwenang untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawaban (Indriasih et al., 2022). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan dalam unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk berwenang meminta pertanggung jawaban laporan yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa. Akuntabilitas merupakan hal yang penting bagi entitas, baik entitas pemerintah maupun bisnis sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada shareholders, sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas melayani masyarakat (Widyatama, 2017).

1. **Macam-macam Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2002) Akuntabilitas terdiri atas dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal *(vertical accountability)*

Pertanggung jawaban vertikal yaitu pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

1. Akuntabilitas horizontal *(horizontal accountability)*

Pertanggungjawaban horizontal yaitu pertanggungjawaban kepda Masyarakat luas.

1. **Aspek-Aspek Akuntabilitas**

Menurut Chairina (2023) Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:

* + - 1. Akuntabilitas mempunyai arti sebagai sebuah hubungan. Adalah komunikasi dua arah yang diterangkan oleh auditor General British Columbia, merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
      2. Akuntabilitas berorientasi hasil. Adalah pada struktur organisasi sector sektor public dan swasta. akuntabilitas tidak hanya melihat input maupun output melainkan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu *(outcome)*, Akuntabilitas memerlukan pelaporan, pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
      3. Akuntabilitas tidak ada artinya tanpa konsekuensi.
      4. Tanggungjawab adalah istilah utama mendefinisikan akuntabilitas. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban datang bersama konsekuensi.
      5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan akuntabilitas yaitu untuk meningkatkan kinerja bukan untuk mencari kesalahan ataupun memberi hukuman.

1. **Indikator Akuntabilitas**

Menurut Banga (2017) Indikator minimum dari terlaksananya akuntabilitas yaitu:

1. Adanya kesamaan atau kesesuaian antara implementasi dan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.
4. **Dimensi Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2004) terdapat empat dimensi dalam akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan menjamin kepatuhan hukum dan peraturan lainnya dalam penggunaan dana public, sementara akuntabilitas terkait dengan menghindari jabatan.
2. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses berkaitan dengan seberapa baik prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dalam hal kecukupan informasi akuntansi, manajemen, dan administrasi.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program berkaitan dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah telah mempertimbangkan program alternatif yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan. Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan terhadap DPR/DPRD dan public secara keseluruhan dibahas dalam kebijakan akuntabilitas.
5. **Kompetensi Aparatur Desa**
6. **Pengertian Kompetensi**

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46 A Tahun ini 2003, Kompetensi yang didefinisikan sebagai kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang.

Menurut Moeheriono (2018) Kompetensi adalah keahlian dan tekad dalam melaksanakan kewajiban dengan kemampuan yang realistis dan praktis untuk mencapai sebuah tujuan Perusahaan. Sedangkan menurut Spencer (dalam Moeheriono, 2018:5) menjelaskan kompetensi adalah keistimewaan atau keuanggulan yang menjadi dasar awal seseorang berhubungan dengan efektivitas kinerja seseorang/individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki sebagai sebab akibat dari standar yang dijadikan tolak ukur dalam kinerja secara prima ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

Dengan desentralisasi fiskal yang ada, pengelolaan dana desa harus memiliki kemampuan untuk memaksimalkan akuntabilitas desa. jika diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, dan jika diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah desa, diperlukan persiapan. Sumber daya manusia adalah komponen yang harus dipersiapkan (Widyatama, 2017).

1. **Karakteristik kompetensi**

Menurut Moeheriono (2018:14) menjelaskan dalam setiap individu mempunyai beberapa karakteristik kompetensi yang paling dasar, yaitu:

1. Watak *(traits)* adalah sifat dasar yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, seperti ketabahan, control, diri, percaya diri, atau daya tahan.
2. Motif *(motive)* yaitu sesuatu dorongan untuk bertindak serta mendasar kesadaran yang difikirkan secara konsisten dan diinginkan seseorang yang dapat mendorong Tindakan untuk melakukan suatu kegiatan
3. Bawaan *(self concept)* yaitu tingkah laku dan kepribadian dasar didalam diri seseorang.
4. Pengetahuan *(knowledge)* yaitu sebuah informasi yang dimiliki oleh seseorang disuatu bidang atau area tertentu.
5. Keahlian (*skill*) yaitu kemampuan dalam mengerjakan tugas baik dalam bentuk fisik maupun mental.
6. **Tipe Kompetensi**

Menurut Rasman (2018) ada beberapa tipe kompetensi sebagai berikut:

1. *Planning competency*

Dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan. Menilai resiko dan mengembangkan urutan Tindakan mencapai tujuan tertentu.

1. *Influence competency*

Dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju organisasional.

1. *Communication Competency*

Bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

1. *Interpersonal Competency*

Meliputi empati, membangun consensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik dan menghargai orang lain.

1. *Thinking competency*

Berkenaan dengan berfikir strategis, berfikir analitis, komitmen terhadap tindakan, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

1. *Organizational competency*

Meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

1. **Jenis-jenis kompetensi**

Menurut Moeheriono (2018) ada 3 jenis kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia antara lain:

1. Kompetensi individu

Kompetensi individu adalah keahlian kerja yang melekat pada seseorang yang dapat menghubungkan keterampilan, pengetahuan dan sikap berdasarkan pembelajaran dan pengalaman dalam upaya pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien.

1. Kompetensi Jabatan

Kompetensi jabatan *(job competency)*, memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dan harus mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen karena aspek kompetensi jabatan sudah banyak dipakai sebagai dasar penentu posisi jabatan calon karyawan. Seseorang agar bisa mencapai kerja optimal, kemampuan seseorang harus sesuai dengan kemampuan mereka. Pekerjaannya akan ada kecocokan *(matching)* dan kesesuaian dengan kemampuan yang dimiliki.

1. Kompetensi organisasi

Organisasi tidak diragukan lagi karena salah satu kompeten yang sangat berpengaruh dan dapat menetapkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi terletak pada komponen Sumber Daya Manusia (SDM)

1. **Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**
2. **Pengertian Sistem Keuangan desa**

Menurut Arfiansyah et al (2020) sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Dimana sistem Siskeudes berbasis computer dan merupakan aplikasi teknologi informasi yang berfokus pada akuntabilitas untuk mengelola keungan desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan dalam Negri No.113 Tahun 2014 yakni pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dalam bentuk sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dimana keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli desa yang harus dikelola dengan baik dan jujur untuk memastikan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa

Pemerintah desa untuk membentuk kebijakan didalam pengelolaan keuangan desa, untuk mencapai tujuan ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Meluncurkan sebuah aplikasi yang bermanfaat guna meningkatkan mutu dari kualitas tata kelola keuangan desa. Pada Juli 2015, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui dana desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar lebih baik kedepannya. Di dalam Siskeudes terdapat program yang ada didalam aplikasi pengelola keuangan desa di sebut *User Friendly* untuk mempermudah penggunaan dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

1. **Tujuan Sistem Keuangan Desa**

Menurut Martini et al (2019) tujuan dibuatnya SisKeudes adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien. Penggunaan Siskuedes merupakan suatu bentuk perkembangan dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut Novita, (2016) adalah suatu aktivitas, data, dokumen dan teknologi yang berkaitannya dirancang untuk mengumpulkan dan memproses data, sampai dengan menyajikan informasi kepada para pengambil Keputusan internal organisasi dan eksternal organisasi.

Menurut Martini et al (2019) program ini bertujuan melaksanakan pelatihan dan pendampingan untuk penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, secara khusus bertujuan:

1. Melatih dan mendampingi pengoprasian dalam penerapan aplikasi Siskeudes terutama pengimputan data penganggaran dan penatausahaan. Penganggaran dan penatausahaan adalah tahap penting dalam pengelolaan keuangan desa karena tahap ini akan terlihat apakah uang yang digunakan sesuai dengan anggaran.
2. Unduk pendampingan dalam menghadapi kendala yang terjadi dilapangan dalan proses penerapan aplikas Siskeudes di desa.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Siskeudes sangat berperan dalam pengelolaan dana desa dan membantu untuk pengelolaan dana desa yang mana secara sistematis dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut Sulina et al (2017). Siskeudes memberikan dampak pada para pegawai yaitu memberikan motivasi untuk bekerja dengan baik dan tepat, kegiatan operasional yang lebih terata secara administrative, mengurangi adanya kecurangan, meningkatkan kinerja pegawai/karyawan, dan dapat menbuat laporan keuangan yang kauntabel.

1. **Indikator Penerapan Sistem Keuangan**

Menurut Ridwan (2019) terdapat 3 komponen dalam Siskeudes untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan yaitu:

1. Integritas keuangan yaitu kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan agar laporan keuangan dapat diandalkan, kualitas informasi memastikan bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan secara akurat menyampaikan apa yang dimaksud untuk dinyatakan.
2. Pengungkapan yaitu menyampaikan informasi keuangan yang berkaitan dengan Perusahaan dilaporan keuangan, yang biasanya dalam laporan tahunan.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yaitu untuk mendorong prinsip akuntabilitas, pengolah organisasi harus mematuhi peraturan.
4. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
5. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
6. **Pengertian Teknologi Informasi**

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2010 pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Aulia et al., 2019). Dalam melaksanakan penyelenggara pemerintah daerah, perlunya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah berkolaborasi dengan lebih mudah dengan menyederhanakan akses antar unit. Selain itu penggunaan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan pokok yang dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas harian aparatur pemerintah secara efisien, akurat,dan tepat waktu. Salah satunya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi keuangan yang akurat yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Menurut Murhada, & Giap (2011) menjelaskan teknologi informasi adalah sebuah alat atau perangkat yang menggunakan informasi untuk membantu pekerjaan dan melakukan tugas atau tanggung jawab yang berkaitan dengan pemprosesan informasi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ini dapat dicapai melalui pengoperasian sistem informasi computer yang terintegritas yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia.

Menurut Brown et al (2012). teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi computer *(hardware dan software)* tetapi juga teknologi komunikasi untuk mengirim dan menyebarkan informasi. Sebagi bagian dari teknologi informasi, *computer* adalah alat yang dapat melipat gandakan kemampuan manusia dan computer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak dapat melakukannya.

1. **Peranan Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan**

Hampir disetiap perkantoran maupun dinas atau instansi pemerintah sudah menggunakan komputer. Penggunaannya umumnya untuk pelayanan masyarakat *(public service)* menyusun dan pengarsipan data penduduk, mengolah data pada administrasi tata usaha, statistika, perencanaan, pengambilan keputusan, dan lain-lain (Murhada, & Giap, 2011).

*E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang bisa meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak lainnya. Penggunaan teknologi informasi dapat menciptakan hubungan bentuk yang baru misalnya: G2B (*Government to Business*), G2C (*Government to Citizen*) dan G2G (*Government to Government*). Apalagi sekarang dengan melalui *e-government*, computer mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan berguna bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi beragam kebijakan, mempromosikan potensi wilayah dan pariwisata, dan sebagainya, melaksanakan pemberdayaan masyarakat seperti kerjasama yang dilakukan antara pemerintah, pelaku bisnis masyarakat.

Bagaimana teknologi informasi akan digunakan untuk membuat keputusan politik dimasa depan, seperti dalam hal pemelihan umum yang merupakan ide atau rencana yang sudah ditetapkan di banyak negara maju. Selain itu warga dapat secara langsung menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka kepada legislatif dan eksekutif pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah setempat.

1. **Manfaat *E-Government***

Manfaat *e-government* yang dapat dinikmati oleh masyarakat antara lain:

1. Fasilitas pelayanan yang baik untuk masyarakat,

Informasi dan keterangan sudah disediakan pelayanan 24 jam sehari dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja meningkatkan hubungan atau interaksi antara pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat, diharapkan hubungan atau interaksi antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini dapat menghilangkan kekesalan dan saling curiga dari semua pihak.

1. Memberdayakan masyarakat melalui sebuah informasi mudah didapat

Dengan tersedianya informasi yang memadai. Masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang fakultas: nomor induk mahasiswa, daya tamping fakultas, IPK, dan sebaginya yang dapat ditampilkan secara online.

1. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Misalnya koordinasi dipemerintahan dapat dilakukan melalui surat elektronik *(email)* atau video *conference*. Bagi Indonesia yang mempunyai luas area wilayah yang sangat besar, hal seperti ini sangat membantu. Seperti tanya jawab, berkoordinasi dan diskusi antar pemimpin daerah yang dapat dilaksanakan tanpa kesemuanya harus hadir dilokasi fisik yang sama.

1. **Partisipasi Masyarakat**
2. **Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi secara umum dari Bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya peran serta. Dalam penjelasan yang lebih luas, partisipasi dapat diistilahkan sebagai bentuk peran serta atau keikut sertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Menurut Sambodo (2006) partisipasi adalah suatu proses yang memungkinkan pemangku kepentingan berinteraksi dan berhubungan lebih baik satu sama lain. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kesepakatan dan tindakan kreatif selama proses pertimbangan, dan memberikan ruang untuk mendengarkan, belajar, berfikir dan memulai tindakan Bersama.

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil jika melibatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan atas muncul sebagai akibat dari tingginya ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah karena jarak yang lebih dekat antara masyarakat dan pemerintah dan pejabat public lebih bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan. Untuk mencapai akuntabilitas masyarakat, seluruh masyarakat harus memiliki akses yang sama untuk mengawasi pemerintah. Dan pemerintah dapat menyediakan akses tersebut (Mada et al., 2017).

1. **Tujuan Partisipasi Masyarakat**

Yang dikemukakan oleh Yabes (2000) tujuan utama partisipasi yaitu:

1. Mengimplikasikan masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan.
2. Menyampaikan hak suara masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan.
3. Mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada konteks social, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

1. **Manfaat Partisipasi Masyarakat**

Menurut USAID (2014) bahwa ada 4 potensi manfaat yang diharapkan dari penerapan partisipasi Masyarakat ini yaitu:

1. Partisipasi dapat menjadi factor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan alokasi anggaran.
2. Perlibatan warga dan organisasi warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan-pendekatan dan program pengembangan yang lebih inventif dan inovatif.
3. Keterlibatan aktif kelompok marginal berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat deskrimiatif.
4. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberative.
5. **Akuntabilitas sebagai persyaratan dalam partisipasi**

Lembaga pemerintahan sesuangguhnya dibuat dan diadakan oleh public (masyarakat). Sebab, para pegawai dalam lembaga pemerintah juga harus mempertanggung jawabkan kinerja kepada public. Apa yang harus dipertanggung jawabkan oleh para pegawai lembaga pemerintahan adalah mencakup semua perilaku, sikap, Tindakan kerja dan berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh publik. MenurutPrianto (2006)upaya membangkitkan partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah membuat dan menetapkan saluran atau akses bagi masyarakat untuk berperan serta.

1. **Faktor-faktor partisipasi masyarakat**

Menurut Pangestu (dalam Rismawati, 2019) terdapat beberapa factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

1. Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, Tingkat Pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
2. Faktor eksternal meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlihat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka, selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran. Maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.
3. **Strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa**

Peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk integrasi dan aksi diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Bersama masyarakat, karena alasan ini, alat dan metode baru, serta metode partisipasi, dianggap sangat penting. Selain itu, transparansi pemerintah desa menjadi keharusan yang tidak dapat diberikan, pemerintah yang visioner dan terbuka terhadap inovasi dan perubahan akan mendorong terciptanya kebijakan yang mendukungpartisipasi dan mendorong motode partisipasi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Terkait dengan upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut, Taliziduhu (1990) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat itu dapat ditumbuhkan atau digerakkan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbaikan kondisi hidup masyarakat disesuaikan dengan keinginan masyarakat yang nyata (*felt need*).
2. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi sebagai pendorong timbulnya jawaban (*respons*) yang dikehendaki.
3. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi menghidupkan kembali tingkah laku yang dikehendaki berlanjut.
4. Proyek pembangunan yang telah disediakan secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
5. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang dapat menggerakkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
6. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. pertumbuhan partisipasi masyarakat memerlukan kesungguhan dan konsistensi dari semua pihak.
7. **Komitmen Organisasi**
8. **Pengertian komitmen organisasi**

Komitemn organisasi sebagai sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi pada Perusahaan, kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati dalam organisasi. Menurut Yusuf & Syarif (2018)komitmen organisasi adalah suatu sikap Dimana individu mengidentifikasi dirinya terhadap tujuan-tujuan dan harapan-harapan organisasi tempat ia bekerja, serta berusaha menjaga keanggotaan dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi desa adalah suatu sikap dimana kepala desa dan perangkat desa berusaha untuk mewujudkan tujuan organisasi.

1. **Bentuk-bentuk Komitmen Organisasi**

Menurut Allen & Meyer (1990) ada tiga komponen komitmen organisasi yaitu:

1. *Affective Commitment*

Terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dariorganisasi, karena adanya ikatan emosional.

1. *Countinueance commitment*

Terjadi apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.

1. *Normative Commitment*

Komitmen normative adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi, karena kewajiban dan tanggungjawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan.

Menurut Widyanti & Basuki (2021) adatiga bentuk dari komitmen organisasi yaitu:

1. komitmen Berkesinambungan

komitemn yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi.

1. Komitmen Terpadu

Komitmen anggota terhadap organisasi sebagai akibat adanya hubungan social dengan anggota lain didalam organisasi.

1. Komitmen Terkontrol

Komitmen anggota pada norma organisasi yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkannya. Norma-norma yang dimiliki organisasi sesuai dan mampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkan.

1. **Indikator komitemen organisasi**

Menurut Murhada, & Giap (2011) ada tiga indicator komitmen organisasi yaitu:

1. Kemauan karyawan dimana adanya keinginan karyawan untuk mengusahakan agar tercapainya kepentingan organisasi.
2. Kesetiaan karyawan dimana karyawan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya untuk terus menjadi salah satu bagian dari organisasi.
3. Kebanggan karyawan ditandai dengan karyawan merasa bangga telah menjadi bagian dari organisasi yang diikutinya, dan merasa bahwa organisasi telah menjadi bagian dalam hidupnya.

MenurutAndhini, (2017)indicator komitmen organisasi yaitu:

1. *Affective commitment*

Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya

1. *Continuance commitment*

Nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan lama dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.

1. *Normative commitment*

Kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.

**8) Dana Desa**

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan khususnya bagi desa kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) kabupaten atau kota dengan cara pemindahan buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKDesa). Dana desa dipakai untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan, penyelenggara pemerintah, menyetorkan/membayar, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah menyalurkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa tersebut berasal dari belanja pemerintah beserta mengefektifkan program berbasis desa dari belanja pemerintah beserta mengefektifkan program berbasis desa secara adil dan merata.

Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 yaitu program dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban desa berdasarkan atas hak asal usul dan kewenangan local berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 juga menyoroti perubahan pengalokasi dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana desa setiap kabupaten/kota dihitung menurut jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, Tingkat kesulitan geografis dan angka kemiskinan desa disetiap kabupaten/kota.

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara taat dan tertib pada ketentuan peraturan perundang-undang, efektif, efisien, ekonomis, bertanggungjawab dan transparan dengan memperhatikan rasa kepatuhan dan keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Penyaluran dana desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketetapan: tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan agustus sebesar 40% dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (Yuliansyah & Rusmianto, 2015)

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan, pembardayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang dimiliki oleh desa. Namun, dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. seperti, pembangunan pelayanan dasar pendidikan, pesehatan, dan infrastruktur. Untuk menghentikan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, dan papan. Jika dana desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting, maka dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. RPJMDesa dan RKPDesa terkait penggunaan dana desa.

7. **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pemendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengeloalaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keungan desaterinegrasi satu sama lain. Dilakukan dengan cara yang teratur dan bijaksana dalam pengeluaran. Setiap desa harus mengikuti dan memenuhi standar pengelolaan keuangan desa agar pemerintahan, Pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

1. **Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Soleh,Chabib.Rochansjah (2019:7). untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaraan untuk suatu tahun anggaran
4. Asas spesialitas yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinsi secara jelas peruntuknya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undang.
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang di utamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun
10. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana public (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada apparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) sehingga jika terjadi selisih dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undang yang berlaku.
14. Asas bertanggung jawab yaitu asas atau prinsip yang diwajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandate untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan ditribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekan kan adanyaa suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional
17. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu asas atau prinsip yang menharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyaraakat desa.

Untuk berbagai asaz atau prinsip pengelolaan keuanagan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, agar dana desa yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan keadilan. Secara efektif berarti bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapai mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Secara efisien maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menhasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluaran.

Sementara secara ekonomis berarti bahwa pengelolaan keuanagan harus dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara nilai masukan dan nilai keluaran, dan secara keadilan berarti bahwa pengelolaan keuangan harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

1. Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa

Permenda No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekuasaan atau atoritas pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) (Burhanuddin, 2016). Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan atau otoritas dalam pengelolaan keuangan desayang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dibedakan atau dipisahkan (Yuliansyah & Rusmianto, 2015). Oleh karena itu menurut Solekhan (2014:73). bahwa kepadala desa memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU NOMOR 6 Tahun 2014 tentang desa sebagi berikut:

1. Terkait dengan Kepala Desa, pasal 26 ayat (1) undang-undang desa menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Wewenang Kepala Desa

Terkait dengan tugas Kepala Desa, pasal 26 ayat (2) undang-undang desa menyebutkan bahwa wewenanag kepala desa dalam mengelola dana desa adalah sebagai berikut:

1. Menemukan kebijakan atau peraturan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menentukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyepakati pengeluaran atau biaya berdasarkan kegiatan yang ditentukan dalam APBDesa.
5. Melaksanakan Tindakan atau aktivitas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalama melakukan pengelolaan keuangan desa dibantu atau didukung oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari elemen perangkat desa yang ditentukan oleh keputusan kepala desa. Elemen perangkat desa tersebut terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berperan selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas:

1. Menyusun melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
2. Menyusun rancangan peraturan desa terhadap APBDesa, perubahan APBDesa, dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
3. Melaksanakan pengadilan atas pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang telah ditentukan oleh APBDesa.
4. Menyusun pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBDesa
5. Melaksanakan verifikasi atas bukti dalam penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
6. **Kepala Seksi**

Kepala seksi berperan sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dengan tugas:

1. Membentuk rencana pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang menjadi kewajibannya.
2. Melaksanakan kegiatan bersama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ditentukan dalam APBDesa.
3. Melaksanakan tindakan atau aktivitas pengeluaran yang mengakibatkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan atau menyampaikan perkembangan atas pelaksanaan kegitan kepada kepala desa.
6. Menyiapkan dokumen anggaran terhadap beban pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan.
7. **Bendahara**

Bendahara dipegang oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara memilikitugas-tugas seperti menyimpan, menerima, menatausahakan, menyetorkan/membayar dan mempertanggung jawabkan penerimaan dalam pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

1. **Penelitian Terdahulu**

Pada bagian penelitian saat ini menggunakan 10 (Sepuluh) penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan yang diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama dan Tahun** | **Judul Penelitian** | **Hasil penelitian** |
| 1. | Suci Atiningsih (2019) | Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana desa, Dan sistem pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi pada Aparatur Pemerintah Desa Se-kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali) | Hasil penelitian ini bahwa:  Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Parisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali |
| 2. | Mualifu Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan Hermawan (2019) | Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (Studi Empiris pada seluruh desa di kecamatan mrebet kabupaten purbalingga) | Hasil penelitian ini bahwa:  Transparansi, Kompetensi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa |
| 3. | Siti Umaira, Adnan (2019) | Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya) | Hasil penelitian ini bahwa:  Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. |
| 4. | Kartika Restu Aprilya, Astri Fitria (2020) | Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa (Kabupaten Gresik) | Hasil penelitian ini bahwa:  kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana keuangan pemerintah Komitmen organisasi berpengaruh posistif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| 5. | siti Nurhayati nafsiah & mei diana (2020) | Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan indralaya | Hasil penelitian ini bahwa:  Kepemimpinan kepala desa berpengaruh, peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan sistem pengendalian intern pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa |
| 6. | siti sarah, taufeni taufik, devi safitri (2020) | Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi Masyarakat dan spi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Indragiri hulu | Hasil penelitian ini bahwa: Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Desa. |
| 7. | Mufti Arief Arfiansyah, 2020) | Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Hasil penelitian ini bahwa:  Sistem Keuangan Desa dan Sistem pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| 8. | Nafadhila Eka Indraswari, Yuliastuti Rahayu (2021) | Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa | Hasil penelitian ini bahwa:  kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas  pengelolaan dana desa. |
| 9. | Ni Kadek Deviyanti & Ni wayan alit wati (2022) | Pengaruh Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa se-kecamatan mengwi kab.bandung) | Hasil penelitian ini bahwa:  Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| 10. | Katryn Natania Mega, Lintje Kalangi, Peter M. Kapojos (2022) | Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Hasil penelitian ini bahwa:  Sistem Keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada kabupaten Bolaang Mongondow Timur |

***Sumber: Dari beberapa penelitian terdahulu***

1. **Kerangka Pemikiran Konseptual**

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empitis terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sehingga didalam penelitian ini kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut.

Variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa (Y) adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan Tindakan seorang atau pimpinan unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang untuk meminta pertanggung jawaban berupa laporan, dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undang dan penting untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa (Sarah et al., 2020). variabel bebasnya yaitu Kompetensi Aparatur desa (X1), Sistem Keuangan Desa (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Partisipasi Masyarakat (X4), Komitmen Organisasi (X5).

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur desa Terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Aparatur yang kompeten akan menghasilakan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Apabila aparatur desa gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya serta belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa (Sarah et al., 2020). Aparatur yang kompeten berpengaruh signifikan akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

1. Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan pangkah Kabupaten Tegal

Siskeudes sangat dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah desa. Pengguna seskeudes memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan memudahkan dalam pemantauan sehingga potensi penyimpangan dapat dikurangi (M. A. Arfiansyah, 2021). Menunjukkan bahwa sistem keuangan desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah khususnya pengelolaan dana desa. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun tidak di sengaja. Dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan masyarakat (Sarah et al., 2020). Pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi pengelola keuangan pemerintah daerah

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kecamatan pangkah kabupaten tegal

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan. Keputusan yang diambil oleh aparatur pemerintah harus melibatkan masyarakat, karena masyarakat harus terlibat secara langsung proses pemerintahan mengambil keputusan dan masyarakat dapat memberikan tanggapan agar dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalagunaan atau penyelewenagan (Sarah et al., 2020). Partisipasi menjadi factor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal

Adanya komitmen organisasi dapat mendukung pengelolaan dana desa agar program-program dapat terlaksana dengan naik. Keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa (Sarah et al., 2020). Aparatur yang memiliki komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengeolaan dana desa.

1. **Hipotesis**

Kompetensi Aparatur Desa

(X1)

H2+

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

(Y)

H1+

Sistem Keuangan Desa

(X2)

H3+

Pemanfaatan Teknologi Informasi

(X3)

H4+



Partisipasi Masyarakat

(X4)

H5+

Komitmen Organisasi

(X5)

2. ***Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Konseptual***

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono, (2016) hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan teori dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

|  |  |
| --- | --- |
| H1: | Terdapat pengaruh positif Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| H2: | Terdapat pengaruh positif Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| H3: | Terdapat pengaruh positif Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| H4: | Terdapat pengaruh positif Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| H5: | Terdapat pengaruh positif Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan analisis statistic SPSS versi 22.0.

1. **Populasi dan Sampel**
2. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pahami dan kemudian mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2019:126). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah pada 23 Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

**Tabel 3.1**

**Populasi penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Desa** | **Jumlah Responden** |
| 1. | Desa balamoa | 4 |
| 2. | Desa Bedug | 4 |
| 3. | Desa Bogares Kidul | 4 |
| 4. | Desa Bogares Lor | 4 |
| 5. | Desa Curug | 4 |
| 6. | Desa Depok | 4 |
| 7. | Desa Dermasandi | 4 |
| 8. | Desa Dermasuci | 4 |
| 9. | Desa Dukuhjati Kidul | 4 |
| 10. | Desa Dukuhsembung | 4 |
| 11. | Desa Grobog Kulon | 4 |
| 12. | Desa Grobog Wetan | 4 |
| 13. | Desa Jenggawur | 4 |
| 14. | Desa Kalikangkung | 4 |
| 15. | Desa Kendal serut | 4 |
| 16. | Desa Paketiban | 4 |
| 17. | Desa Pangkah | 4 |
| 18. | Desa Pecabean | 4 |
| 19. | Desa Pener | 4 |
| 20. | Desa Penusupan | 4 |
| 21. | Desa Purbayasa | 4 |
| 22. | Desa Rancawiru | 4 |
| 23. | Desa Talok | 4 |
| Jumlah | | 92 |

***Sumber : diolah untuk penelitian***

1. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019:127). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sehingga sempel dalam penelitian ini berjumlah 92 responden yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. **Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel**
2. **Definisi Konseptual Variabel**

Definisi konseptual variabel adalah penarikan Batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, padat, dalam penelitian ini, ada dua jenis variabel yaitu:

1. Variabel Terikat/Dependen (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya terkait dengan pengelolaan dana desa (Mardiasmo, 2002).

1. Variabel Bebas/Independen (X)
2. Kompetensi Aparatur

Menurut Kharis, (2010) kompetensi aparatur yaitu kemampuan aparatur dalam (memahami peraturan pengelolaan dana desa) mengelola keuangan. Bertujuan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dengan suatu bekal pelatihan, Pendidikan dan pengalaman yang cukup memadai.

1. Sistem Keuangan Desa

Menurut Martini et al, (2019) Sistem keungan desa adalah aplikasi berbasis komputer sistem keuangan desa yang diterbitkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Nurkhasanah (2019) pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan secara maksimal dari komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis-jenis lainnya yang berkaitan dengan teknologi.

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Sujarweni (2015) Partisipasi Masyarakat yaitu bentuk peran serta atau keikut sertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan prinsip bahwa semua warga desa memiliki hak untuk terlibat langsung dalam pengambilan Keputusan tentang semua kegiatan yang dilakukan.

1. Komitmen Organisasi

Menurut Nurkhasanah (2019) Komitmen organisasi pemerintah desa adalah suatu sikap Dimana individu mengidentifikasi dirinya terhadap tujuan dan harapan-harapan organisasi tempat bekerja, berusaha menjaga keanggotaan dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

1. **Definisi Operasional Variabel**

Definsi operasional variabel adalah batasan pengertian tentang variabel penelitian yang didalamnya sudah mencerminkan indicator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, akan dirumuskan kedalam masing-masing indicator yang merupakan ciri-ciri dari variabel tersebut. Operasionalisasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Operasional Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
| Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  (Y)  (Alauddin, 2020) | Kejujuran | -Kejujuran dan keterbukaan informasi  -Kepatuhan dalam pelaporan | Interval |
| Proses | -Kesesuaian prosedur  -Kecukupan informasi  -Ketetapan penyampaian laporan |
| Kompetensi  Aparatur  (X1)  (Alauddin, 2020) | Pengetahuan  (*Knowledge*) | -Pengetahuan  -Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan | Interval |
| Kemampuan  (*skill*) | -Keahlian teknis  -Kemampuan mencari Solusi |
| Sikap  (*attitude*) | -Inisiatif saat bekerja  -Keramahan dan kesopanan |
| Sistem Keuangan Desa  (X2) | Tanggungjawab | -Integritas keuangan  -Pengungkapan  -Taat terhadap peraturan | Interval |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi  (X3)  (Alauddin, 2020) | Sarana Prasarana | -Kecukupan jumlah komputer yang tersedia  -Adanya software pendukung  -Ketersediaan jaringan internet  -Adanya jadwal pemeliharaan peralatan | Interval |
| Sasaran | -Dimanfaatkan sesuai ketentuan  -Proses terkomputerisasi |
| Partisipasi Masyarakat  (X4)  (Alauddin, 2020) | Pengambilan Keputusan | -Keterlibatan dalam proses pengambilan Keputusan program desa | Interval |
| Penyusunan anggaran | -Mengusulkan rencana anggaran  -Terlibat dalam rapat paripurna |
| Pelaksanaan anggaran | -Terlihat mengawasi dan melaporkan  -Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran  -Memberikan penghargaan |
| Komitmen Organisasi  (X5) | Komitmen | -Komitmen efektif  -Komitmen berkelanjutan  -Komitmen normatif | Interval |

1. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan suatu alat bantu (Sugiyono, 2019:194)**.** Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan Teknik survey yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung diserahkan kepada responden di desa se-kecamatan pangkah. Penelitian ini memilih cara demikian dengan mengembangkan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

Dalam pengisian jawaban, penulis memberikan skor tiap item jawaban dengan skala likert. Skala Likert alat atau cara untuk mengukur pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena social. Dengan skala Likert maka variabel yang diukur kemudian dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala Likert memiliki nilai dari sangat positif sampai negative, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019) sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Sangat setuju | : 5 |
| Setuju | : 4 |
| Kurang Setuju | : 3 |
| Tidak setuju | : 2 |
| Sangat tidak setuju | : 1 |

1. **Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian**
2. **Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Hasil uji validasi masing-masing indikator variabel terhadap total skor konstruk untuk variabel Komperatur, Sistem Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, menunjukkan hasil yang signifikanyaitu jika r hitung ≥ r tabel (0,000 ≥ 0,05). Maka item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (valid). Jika r hitung < r tabel (0,000 < 0,05) maka item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (tidak valid).

1. **Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *Cronbach alpha* (a) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2016:47).

1. **Metode Analisis Data**
2. **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari mean, standar deviasi, minimum dan maksimum (Ghozali, 2016:19)

1. **Uji Asumsi Klasik**

Menurut Ghozali (2016:103). Uji asumsi klasik atau persyaratan analisis yang diperlukan untuk penelitian yang menggunakan. Uji Asumsi Klasik dapat dijelaskan melalui Uji Normalitas, dan Uji Heteroskedastisitas dari kedua Uji tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan dengan maksud untuk menguji didalam model regresi apakah residual atau variabel pengganggu tersebar secara merata. Model regresi baiknya mempunyai nilai residual yang terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan uji *komogorov-Smirnov* (K-S) dimana data penelitian akan memenuhi asumsi normalitas atau terdistribusi normal jika mempunyai tingkat signifikannya α > 0.05 (Ghozali, 2016:161).

1. **Uji Heteroskedastisitan**

Uji Heterokedastisitan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas kebanyakan data *crossection* mengandung situasi heteroskedastisitan karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2016:134).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scattersplot antara SRESID dan ZPRED Dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi -Y sesungguhnya) telah di studentized. Dasar analisis sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
3. **Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi pada penelitian terdapat kolerasi antar variabel independent (bebas). Model regresi pada penelitian terdapat kolerasi antar variabel independen (bebas). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika menunjukkan adanya variabel independen yang memiliki nilai korelasi, maka variabel tersebut dikatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang memiliki nilai korelasi sesama variabel independen sama dengan nol. Nilai cut off secara umum yang dipakai untuk memperlihatkan adanya multikolinieritas adalah nilai variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independent sama dengan nol. Nilai cut off yang umum di pakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu jika nilai dari tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2016:103).

1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara Bersama-sama terhadap variabel dependen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui . Dalam penelitian ini sebagai berikut:

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+ e

Keterangan:

|  |  |
| --- | --- |
| Y | : Akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| α | : Konstanta |
| b1 b2 b3 b4 b5 | : Koefisiensi regresi |
| X1 | : Kompetensi aparatur desa |
| X2 | : Sistem keuangan desa |
| X3 | : Pemanfaatan teknologi informasi |
| X4 | : Partisipasi masyarakat |
| X5 | : Komitmen organisasi |
| e | : Standar error |

1. **Pengujian Hipotesis**
2. **Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Menurut Ghozali (2016:96). Penggunaan uji statistik F sebenarnya untuk mengukur kesesuaian fungsi regresi sampel dalam menghitung nilai actual (Goodness of Fit). Uji F dibuat untuk mengetahui apakah variabel independen bisa menerangkan variabel dependen dengan baik. Uji F juga untuk mengukur apakah model penelitian yang dipakai telah layak atau tidak. Ketetapan nilai dari hasil uji F dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika F hitung > F tabel, atau nilai signifikansi <0,05 maka dinyatakan bahwa model yang digunakan layak dalam penelitian.

2) Jika F hitung < F tabel, atau nilai signifikansi >0,05 maka dinyatakan bahwa model yang digunakan tidak layak dalam penelitian.

1. **Uji Parsial (Uji t)**

Uji t (Uji parsial), yaitu untuk menguji apakah variabel independent, secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal inimenunjukkan bahwa variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
2. Nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
3. **Koefisien Determinasi R2**

Menurut Ghozali (2016:95) koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.